

## Analisis Penerepan Akuntansi Pemerintahan Di Kantor Camat Mamajang Kota Makassar

### *Analysis of The Implementation of Government Accounting in The Camat's Office Mamajang Makassar City*

**Gilang Dewi Zoraya\*<sup>1</sup>, Hermawaty Abubakar<sup>2</sup>, Faridah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

\*Correspondent author email: [gilangdewizorayaa@gmail.com](mailto:gilangdewizorayaa@gmail.com)

Diterima: 02 Mei 2024 / Disetujui: 30 Agustus 2024

**Abstrak.** Institusi perlu mengadakan pengecekan keadaan letak posisi dan kinerja institusinya, maka dari itu, dibutuhkan sebuah laporan yang terorganisir secara sistematis pada waktu tertentu dalam wujud laporan keuangan. Dalam upaya menciptakan standar yang baik, pemerintah mengadakan dan mengatur penyajian laporan dan mengontrol keuangan. Peneliti menerapkan suatu metode kualitatif dari sebuah studi kasus yakni penelitian yang tidak mengaplikasikan penghitungan sebagai dasar dari penelitiannya. Kegiatan inti dalam penelitian ini, memaparkan hal-hal yang berkaitan tata kelola akuntansi pada kantor camat mamajang berdasar data kas yang didapatkan secara kualitatif yang laporan tersebut akan diselesaikan di tahun 2023. Dasar akuntansi yang dimanfaatkan pada kantor Kecamatan Mamajang Kota Makassar adalah berbasis akrual yang menggunakan neraca, yang mana laporan ini telah divalidasi dan memberi efek dari sebuah transaksi serta mencatat peristiwa yang terjadi dalam hal melihat kas sama dalam kuantitas kas yang dapat diberi dana. Terkait dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan tersebut menyajikan tujuh poin yang mencakup beberapa komponen, sedangkan data yang ditemukan di kantor Kecamatan Mamajang Kota Makassar hanya mengambil lima komponen dalam melaporkan anggaran dalam bentuk buku yang didalamnya mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2022.

**Kata Kunci:** Kinerja, Laporan Keuangan, Peraturan Pemerintah, Makassar

**Abstract.** Institutions need to check the position and performance of their institutions, therefore, a systematically organized report is needed at a certain time in the form of a financial report. In an effort to create good standards, the government organizes and regulates the presentation of reports and controls finances. Researchers apply a qualitative method from a case study, namely research that does not apply calculations as the basis of the research. The core activity in this research is to explain matters related to accounting governance at the Mamajang sub-district office based on cash data obtained qualitatively, the report of which will be completed in 2023. The accounting basis used at the Mamajang sub-district office, Makassar City, is accrual-based which uses balance sheet, where this report has been validated and gives the effect of a transaction and records events that occur in terms of seeing cash equal to the quantity of cash that can be funded. Regarding the Republic of Indonesia government regulation number 71 of 2010 concerning government accounting standards, this regulation presents seven points which include several components, while the data found in the Mamajang District office, Makassar City only takes five components in reporting the budget in book form which includes the Realization Report Budget, Balance Sheet, Operational Report (LO), Report on Changes in Equity, and Notes to Financial Reports (CALK) for 2022.

**Keywords:** Performance, Financial Reports, Government Regulations, Makassar



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Suatu perusahaan membutuhkan pengecekan keadaan dan posisi keuangan dan kinerja perusahaannya. Maka dari itu, laporan yang disajikan secara terorganisir dan sistematis diperlukan. Dalam menciptakan suatu standar yang tertib. Maka dari itu, pemerintah mengadakan dan mengatur penyajian laporan dalam mengontrol laporan keuangan. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah

nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah. Tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah sebagai dasar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam menerapkan tugas pemerintah yang berhubungan dengan keuangan dalam menyelesaikan perosalan yang timbul yang aturannya tidak terdapat di dalam standar.

Terdapat sembilan langkah yang diterapkan dalam siklus penagihan, yaitu masa antara awal tagihan dengan akhir suatu tagihan atau faktur, tanggal laporan ke tanggal tagihan berikut sebagai penerapannya. Langkah pertama yaitu fase analisis transaksi, yakni proses siklus akuntansi yang didalamnya memuat laporan-laporan data dari berbagai transaksi baik berupa debit maupun kredit. Langkah kedua, adalah perekaman peristiwa yakni langkah pencatatan transaksi secara sistematis. Langkah ketiga adalah mengklarifikasi data, dimana langkah ini menjelaskan data yang ada. Langkah keempat, setelah melakukan ketiga langkah diatas selanjutnya diadakan persiapan hasil tes. Yaitu saldo dari tiap kode akun pada catatan bear akan diringkas dan ditambahkan ke neraca saldo pada akhir periode. Langkah selanjutnya ialah melakukan pencatatan dan penyesuaian terhadap data pada transaksi prabayar/pembayaran di muka atau transaksi akrual. Langkah ke enam yaitu pembuatan pengujian laporan khusus pelanggan. Ketujuh yaitu, menyusun laporan keuangan. Keuangan merupakan hal penting dalam suatu organisasi sebagai suatu alat pembiayaan transaksi. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu disusun secara akurat agar informasi yang disajikan mengenai informasi pemasukan dan pengeluaran dapat dijamin keakuratannya. Langkah selanjutnya ialah, mendaftarkan dan menerbitkan entri keputusan dan langkah terakhir yakni, mempersiapkan hasil tes setelah selesai.

Standar akuntansi pemerintahan disingkat dengan SAP merupakan standar pertama di Indonesia yang mengatur penyamaan sistem akuntansi pemerintahan di tanah air kita. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang SAP yang didalamnya terdapat pelaporan keuangan kumulatif yang merupakan laporan anggaran keuangan. Pelaporan pelaksanaan anggaran adalah pelaporan yang dilaksanakannya suatu anggaran dan perubahan saldo anggaran lebih. Pelaporan keuangan mencakup laporan kegiatan, permodalan, neraca dan cash flow. Masing- masing pelapor menyajikan komponen laporan keuangan, sedangkan pelaporan cash flow dilakukan oleh entitas yang bergerak dalam fungsi keuangan umum, sedangkan perubahan saldo anggaran lebih dilakukan oleh bendahara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Friya Rispa dalam sebuah penelitian berjudul "Analisis akuntansi pada komisi pemilihan umum kabupaten rokan hulu" menemukan bahwa adanya bagian yang tidak tersampaikan yaitu laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan pada laporan keuangan yang dibuat hanya berisi laporan pelaksanaan pelaksanaan anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Peneliti menemukan hal yang berbeda dengan kantor kecamatan mamajang, penerapan akuntansi di wilayah tersebut meliputi laporan kinerja anggaran, laporan operasional, neraca catatan laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Ketiadaan CALK bisa menambah kesalahpahaman para pembaca mengenai laporan keuangan, karena tidak semua pembaca berasal dari kelompok penggiat akuntansi, sehingga kemungkinan terjadinya ketidak pahaman mengenai akuntansi yang tersaji dalam bentuk angka. Selain itu, laporan operasi tidak akan memiliki gap/kelebihan operasi lebih dari satu periode pelaporan, yang dapat meningkatkan jumlah kesalahan data jika tidak hati-hati dalam entri data.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sejenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus obyek penelitian adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KAS Keuangan di kantor camat mamajang, yang akan diselesaikandi tahun 2023. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, dan fungsinya sebagai pendukung tugas penelitian sebagai instrumen. Dengan demikian kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sejenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif melakukan penelitian padalatar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat difahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Pendekatan kualitatif menurut Kriek dan Miller dalam buku Moleong menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara intensif dan terperinci tentang gejala dan fenomena sosial yang diteliti yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bendahara umum kantor camat mamajang dalam meningkatkan pengelolaan dana pemerintahan melalui data kas yang diperoleh secara kualitatif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a) Gambaran Umum Pengelolaan Laporan Keuangan Kecamatan Mamajang

Pengelolaan keuangan di kecamatan mamajang selama dikelola oleh bendahara umum kecamatan untuk menerapkan perlakuan akuntansi kecamatan mamajang yang mencakupi transaksi pendapatan dan belanja daerah yang mengacu pada PP no 71 tahun 2010 tentang SAP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP daerah berbasis akrual bagi pemerintah daerah. Jika PP Nomor 71 Tahun 2010 dijadikan sebagai pedoman dari laporan keuangan tersebut terdiri dari 7 komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan secara akrual dibenarkan oleh bendahara kantor kecamatan mamajang yang disajikan dalam bentuk neraca dan buku kas umum. Dasar akuntansi yang digunakan pada kantor kecamatan mamajang kota makassar ialah berbasis akrual yang menggunakan neraca, yang mana laporan ini divalidasi dapat memberi efek dari sebuah transaksi dan mencatat peristiwa yang terjadi dalam hal melihat kas sama dalam hal kuantitas kas yang dapat diberi dana.

Untuk basis kas umum atau laporan realisasi anggaran, dimana laporan akuntansi mengakui efek dari proses jual beli serta beberapa faktor pada saat kas atau hal yang memiliki nilai jual sama dengan kas yang didapatkan. Laporan aktivitas berbasis kinerja dapat ditafsirkan sebagai pendapat yang dibenarkan dalam memperoleh hak penghasilan terpenuhi, mesti uang belum beres penagihan dilakukan di kas daerah dan juga mencatat biaya yang terkait dengan hutang mengalami penurunan aset bersih yang diperoleh sebelumnya meskipun uangnya masih ada di kas daerah. Tentang anggaran yang diimplementasikan dan kas dimana Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA) disusun secara tunai dapat diartikan bahwa penerimaan keuangan dan pendapatan dicatat ketika uang tunai tiba di kantor kas daerah untuk pengeluaran, transfer, dll. Keuangan biaya yang dicatat selama masih ada uang tunai di tempat kasir. Akumulasi saldo dengan aset adalah wajib direalisasikan selama proses dan modal dibenarkan dan terdaftar transaksi mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, jika kas daerah menerima atau mengeluarkan kas kecamatan. Dari apa yang ditemukan di lapangan bahwa Pengadaan Laporan Keuangan kecamatan mamajang kota makassar telah mengikuti ketentuan yang berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena memang benar telah berada dalam kondisi sesuai jika berpatokan pada item-item yang diterapkan pada laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### b) Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Pada Pp Nomor 71 Tahun 2010

##### 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pada kantor camat mamajang struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijabarkan sebagai berikut

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.008.252.000000,00 sedangkan, realisasi belanja per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 37.570.787.074,00 yang terdiri dari:

(a) Belanja oprasional sebesar Rp. 29. 409.288.666,00

(b) Belanja modal sebesar Rp. 3.296.538.027,00

Surplus tahun 2022 adalah fakta yang membandingkan antara diwujudkannya pendapatan daerah yang dikurangkan dengan realisasi belanja, dengan rincian yang terdiri dari:

(a) Jumlah realisasi pendapatan daerah senilai Rp. 1.008.252.000,00

- (b) Jumlah realisasi belanja daerah senilai Rp. 32.705.826.693,00  
 (c) Surplus/Defisit senilai (31.697.574.693,00)

Dalam hal ini, pencatatan anggaran pada LRA dibuat berdasarkan pada data pendapatan dan juga pembiayaan yang telah dibenarkan pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum baik Pusat maupun Daerah. Realisasi pendapatan pada kantor camat mamajang kota makassar senilai Rp. 1.008.252.000,00 yang berasal dari retribusi.

Sedangkan belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah untuk dibelanjakan dimana jumlah yang dikeluarkan oleh kantor camat mamajang kota makassar. Belanja kantor camat mamajang kota makassar tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp. 37.570.787.074,00 dan terealisasi senilai Rp. 32.705.826.693,00 atau 87,05% yang berarti terdapat sisa anggaran senilai, Rp. 4.864.960.381,00 atau 12,94% yang berasal dari belanja operasi (pengeluaran yang menyangkut dengan kesejahteraan pekerja, dan pengeluaran kas dalam hal barang dan jasa), Belanja Modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung atau bangunan, belanja jalana, irigasi, dan jaringan).

2) Neraca

Neraca terhadap pemerintah daerah ialah bentuk rangkaian untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan letak keuangan suatu akuntansi/entitas pelaporan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Neraca yang ditemukan dilapangan pada laporan desember 2022, pada ketiga poin diatas didalam terbagi lagi menjadi beberapa point, yakni:

- (a) Jumlah aset sebesar Rp. 17.957.266.546,88 yang terdiri dari:
- Aset lancar senilai Rp 1.579426.700
  - Aset tetap senilai Rp 16.337.522.168,30
  - Aset lainnya sebesar Rp 40.317.678,58
- (b) Jumlah kewajiban sebesar Rp 97.124.612  
 (c) Ekuitas sebesar Rp. 17.860.357.434,88

Dalam aturan pemerintah mengenai akuntansi standar pemerintah, neraca akan diuraikan sebagai berikut

- 1) Aset  
 2) Perbedaan di temukan antara desember 2021 dan desember 2022 yaitu Rp. 15.527.407.721,02 pada desember 2021 dan Rp. 17.957.266.546,88 pada 2022, jadi dari selisih diatas ditemukan peningkatan di tahun 2022 senilai Rp. 2.429.858.825,86.  
 3) Dari data di atas ditemukan perbedaan nilai juga pada setiap aset, data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Aset**

Jenis Aset	2021	2022
Aset Lancar	Rp. 1.965.751.200	Rp. 1.579.426.700
Aset Tetap	Rp. 13.521.518.842,44	Rp. 16.337.522.168,30
Aset Lainnya	Rp. 40.317.678,58	Rp. 40.317.678,58
Tota	Rp. 15.527.407.721	Rp. 17.957.266.547

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Mamajang Tahun Anggaran 2022

Dari data diatas dapat dipaparkan data sebagai berikut:

1) Aset Lancar

**Tabel 2. Aset Lancar**

Aset Lancar	2021	2022
Kas Pengeluaran Bendahara	0	0
Piutang Retribusi Bruto	Rp. 2.405.703.000,00	Rp 2.405.703.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(833.975.500,00)	(444.643.800,00)
Piutang Retribusi Netto	Rp. 1.961.059.200	Rp. 1.571.727.500
Persediaan	Rp. 4.512.000	Rp. 7.699.200
Total	Rp. 1.965.571.200	Rp. 1.579.426.700

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Mamajang Tahun Anggaran 2022

## 2) Aset Tetap

**Tabel 3.** Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo	Saldo per 2022
Tanah	Rp. 5.592.350.000	Rp. 6.804.950.000
Peralatan dan mesin	Rp. 11.196.825.808	Rp. 13.247.505.007
Gedung dan Bangunan	Rp. 7.463.701.481	Rp. 8.004.707.008
Jalan, Irigasi dan Jarinningan	Rp. 684.267.495,00	Rp. 1.063.032.995
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp. 11.432.125.941,56)	(Rp. 12.790.172.841,70)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.337.522.168,30</b>	<b>Rp. 13.521.518.842,44</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Mamajang Tahun Anggaran 2022

## 3) Aset lainnya

**Tabel 4.** Aset Lainnya

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2022
Aset tak berwujud	Rp. 87.000.000,00	Rp. 87.000.000,00
Akumulasi amortisasi	(Rp. 87.000.000,00)	(Rp. 87.000.000,00)
Aset lain-lain	Rp. 40.317.678,58	Rp. 40.317.678,00
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	0	0
<b>Total</b>	<b>Rp. 40.317.678,58</b>	<b>Rp. 40.317.678,58</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Mamajang Tahun Anggaran 2022

## c) Laporan Operasional (LO)

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran.

Laporan operasional disajikan dalam beberapa bentuk yaitu;

## 1) pendapatan

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2022 adalah senilai Rp. 1.008.252.000,00. Masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Di Kantor Camat Mamajang pendapatan ini diperoleh dari Pemungutan Retribusi Sampah yang dilakukan di 13 kelurahan. Terdapat kenaikan sebesar 24,64 % dari pendapatan daerah di tahun 2022 senilai Rp. 1.008.252.000.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2021 senilai Rp. 808.899.000. karena keadaan sudah mulai membaik, ppkm juga sudah dihapuskan sehingga kegiatan pengumpulan retribusi sampah yang dikelola setiap kelurahan sudah mulai mengalami peningkatan kinerja.

## 2) beban

Beban LO adalah konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 (satu) tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Realisasi dari beban dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Beban pegawai

Beban pegawai adalah saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi senilai Rp. 9.666.286.992,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022.

Dari data diatas disimpulkan bahwa data pada beban pegawai ini mengalami penurunan sebesar 8,99%, hal ini Cuma dipengaruhi oleh mutasi keluar masuk pegawai, karena selama tahun 2022 ada beberapa pergantian pemangku jabatan Di Kantor Camat Mamajang Kota Makassar.

- Beban persediaan

Beban Persediaan adalah saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp. 4.419.915.273,00. Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (useofgoods). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai perunit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk beban persediaan mengalami penurunan senilai Rp. 1.724.106.694 atau 63,96% dibanding dengan tahun 2021.

- **Beban Jasa**  
Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp. 13.577.376.628,00. Mengalami peningkatan senilai Rp. 1.384.208.978,00 atau 10,49% dibanding dengan tahun sebelumnya karena hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa konsultasi sudah dapat dilaksanakan.
- **Beban Pemeliharaan**  
Beban Pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp. 288.607.061 mengalami penurunan sebesar 29,06% atau senilai Rp. 118.212.001 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- **Beban Perjalanan**  
Dinas Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 453.700.012,00. Mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun 2021 disebabkan oleh pembatasan di beberapa daerah sudah mulai di cabut sehingga kegiatan perjalanan dinas dan konsultasi ke daerah sudah mulai dilakukan seperti biasa dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 343,92% atau senilai Rp. 351.495.878,00.
- **Beban Penyusutan**  
Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dinilai Rp. 1.367.046.900,14 mengalami penurunan sebesar 34,69% di bandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp. 2.093.228.572,60.
- **Beban Penyisihan Piutang**  
Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyusutan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi senilai Rp. 389.331.700,00. Peningkatan sebesar 36,47% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp. 285.297.175,00.
- **Beban Lain-lain**  
Beban Lain-lain adalah saldo Beban lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp. 197.036.000

3) **Surplus/Defisit**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Suplus/deficit dari operasi selama satu periode yaitu dari data tahun 2021 pendapatan menunjukkan angka realisasi senilai Rp. 808.899.000,00 sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran menunjukkan di angka Rp. 1.008.252.000,00 yang berarti mengalami kenaikan senilai Rp. 199.353.000,00 atau sebesar 24,64%. Dan untuk surplus/defisit dari operasi beban realisasi anggaran tahun 2021 menunjukkan di angka Rp. 29.397.882.659,60 dan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 1.961.417.906,54 atau sebesar 6,67% yang berarti angka yang ditunjukkan senilai Rp. 31.359.300.566,14 di tahun 2022.

Data tersebut dapat dilihat pada Table 5. berikut:

**Tabel 5.** Surplus/Defisit

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	808.899.000,00	1.008.252.000,00	199.353.000,00	24.64
Beban	29.397.882.659,60	31.359.300.566,14	1.961.417.906,54	6.67

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Total	(28.588.983.659,60)	(30.351.048.566,14)	1.762.064.906,54	(6.16)

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Mamajang Tahun Anggaran 2022

#### 4) Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/deficit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 defisit senilai (Rp. 30.351.048.566,14)

##### (a) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Laporan Operasional adalah laporan menghubungkan antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas senilai Rp. 15.430.283.109,02 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.
- Surplus/defisit-LO tahun 2022 Pemerintah Kota Makassar senilai Rp. 30.351.048.566,14 adalah defisit atas kegiatan operasional (basisakrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
- Pada LPE terdapat selisihnya senilai hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Koreksi Asset tetap bertambah senilai Rp. 1.083.548.199,00
  - Mutasi keluar / masuk aset tetap senilai Rp. 0.00

##### (b) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan dalam bentuk penjelasan terkait rincian komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan, dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat memberikan informasi tentang pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan kantor kecamatan mamajang kota makassar.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan beberapa poin yang mencakup komponen-komponen berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pendataan mendetil atas Laporan Keuangan. Data yang ditemukan dilapangan memiliki perbedaan. Data yang ditemukan di kantor camat mamajang hanya mengambil 5 komponen dalam melaporkan anggaran dalam bentuk buku anggaran tahunan yakni, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuita, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022. Pengelolaan kas diolah langsung oleh bendahara umum yang dibantu oleh subbagian perencanaan dan keuangan. Arus dana keluar dan masuk yang disajikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya setelah pelaporannya akan disampaikan kepada camat mamajang, yang kemudian akan disesuaikan realitasnya sebagai bentuk pertanggung jawaban realisasi dana pertahun. Dalam penyajian data tersebut meskipun hanya menggunakan lima komponen tapi tetap menggunakan arus dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meskipun tidak semuanya, dengan demikian laporan tersebut telah mengikuti pengaplikasian system berbasis akrual dan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pelaporan keuangan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung.2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.  
Anshari Ritonga. (2010). Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak, dari World Wide Web:

- <http://economy.okezone.com>
- Ar-rumi, J. (2014). Tahapan-Tahapan Siklus Akuntansi Pada Pemerintahan
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erlina, Rambe, O.S dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Langelo, at.al. (2015). "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung". Jurnal EMBA. Vol.3 No.1
- Laughlin, R. (2012). Dabate: Accrual Accounting: Information for Accountability or Decision Usefulness? Public Money & Management.
- Mahsun, dkk. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Mukhtaromin, Widyaiswara Madya Pusdiklat Ap. 2014. Publikasi Oleh BPPK Kemenkeu. Penerapan aktual berbasis saiba.
- Nordiawan, Deddi, et al. 2009. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Dewan Negara No.71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rispa, F. (2015). Analisis Penerapan. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, 6.
- Tudor, A.T & Mutiu, A. (2006). Cash Versus accrual accounting in public sector. Universitas Babes Bolyai, Cluj Napoca.
- Wijaya. (2008). Kajian Model Empiris Perilaku Berwirausaha UKM DIY dan Jawa Tengah. Jurnal Manajemen dan Kewirausa.